



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 6 Nomor 2, 2023
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 04/08/2023

Reviewed : 11/08/2023

Accepted : 12/08/2023

Published : 16/08/2023

Lulu Savitri I. Lumuan¹
 Asmun Wantu²
 Udin Hamim³

PERAN GURU PPKN DALAM MENGEMBANGKAN KECERDASAN MORAL PESERTA DIDIK DI SMP NEGERI 1 BANGGAI TENGAH KABUPATEN BANGGAI LAUT

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran para guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam mengembangkan kecerdasan moral pada peserta didik di SMP Negeri 1 Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Informan penelitian melibatkan satu orang guru PPKn, empat orang peserta didik, serta satu orang kepala sekolah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Guru PPKn di SMPN 1 Banggai Tengah memiliki beberapa peranan signifikan dalam mengembangkan kecerdasan moral siswa. *Pertama*, sebagai demonstrator guru PPKn menjadi teladan bagi perilaku dan tindakan moral siswa. Mereka berhasil mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat menginternalisasi nilai-nilai tersebut. *Kedua*, sebagai mediator dan fasilitator guru PPKn membantu siswa dalam memahami konsep-konsep moral, memfasilitasi diskusi, serta merangsang refleksi mengenai isu-isu moral. Interaksi ini menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan inspiratif, sekaligus membantu siswa menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. *Ketiga*, sebagai evaluator guru PPKn secara berkelanjutan menilai perkembangan moral siswa dengan menggunakan berbagai metode penilaian. Namun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan peranan guru PPKn dalam membentuk kecerdasan moral siswa. *Pertama*, kedisiplinan siswa yang belum mencapai tingkat optimal dapat berdampak pada efektivitas peranan guru dalam proses pembelajaran PPKn. *Kedua*, terdapat keterbatasan dalam komunikasi antara orang tua dan sekolah, yang mengakibatkan peran guru tidak dapat berjalan dengan maksimal. Dalam kesimpulannya, peran Guru PPKn memiliki kontribusi yang sangat penting dalam meningkatkan kecerdasan moral siswa.

Kata kunci: Peran Guru PPKn, Kecerdasan Moral, SMP Negeri 1 Banggai Tengah.

Abstract

This study aims to determine the role of Pancasila and Citizenship Education (PPKn) teachers in developing moral intelligence in students at SMP Negeri 1 Banggai Tengah, Banggai Laut Regency. This study applies a qualitative descriptive approach by collecting data through interviews, observation, and document analysis. The research informants involved one Civics teacher, four students, and one school principal. The results of the study revealed that PPKn teachers at SMPN 1 Banggai Tengah had several significant roles in developing students' moral intelligence. First, as a demonstration teacher, PPKn is a role model for students' moral behavior

¹ Prodi PPK, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo
 lulusavitri6@gmail.com

² Prodi PPK, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo
 asmun.wantu@ung.ac.id

³ Prodi PPK, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo
 udin.hamim@ung.ac.id

and actions. They succeeded in integrating Pancasila values into the learning process, so students could internalize these values. Second, as a mediator and facilitator the Civics teacher assists students in understanding moral concepts, facilitates discussion, and stimulates reflection on moral issues. This interaction creates an interactive and inspiring learning environment, while helping students apply moral values in everyday life. Third, as evaluators, PPKn teachers continuously assess students' moral development using various assessment methods. However, there are several inhibiting factors in carrying out the duties of Civics teachers in shaping students' moral intelligence. First, the discipline of students who have not reached the optimal level can have an impact on the effectiveness of the teacher's role in the Civics learning process. Second, there are limitations in communication between parents and schools, which results in the teacher's role not being able to run optimally. In conclusion, the role of the Civics Teacher has a very important contribution in increasing students' moral intelligence.

Keywords: The Role of Civics Teachers, Moral Intelligence, Banggai 1 Middle School.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan tindakan yang disadari untuk mempersiapkan individu melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan guna menghadapi peran mereka di masa mendatang. Dalam konteks ini, sekolah berperan sebagai lembaga pendidikan resmi yang secara terencana menciptakan beragam lingkungan pendidikan, menciptakan peluang bagi siswa untuk mengambil bagian dalam berbagai aktivitas pembelajaran. Setiap kegiatan pendidikan diarahkan untuk mencapai pertumbuhan pribadi yang optimal, sesuai dengan potensi unik masing-masing siswa. Pendidikan merupakan proses psikologis yang terkait erat dengan proses belajar-mengajar, sehingga melibatkan interaksi antara siswa dengan tujuan tertentu. Salah satu tujuan utama pendidikan adalah mempersiapkan siswa agar mampu beradaptasi dengan peran mereka dalam berbagai konteks kehidupan di masa depan secara konsisten. Berkenaan dengan hal itu, Novianti et al., (2020) mengemukakan bahwa Pendidikan memang merupakan kegiatan yang khusus dilakukan oleh manusia dan melibatkan proses pemberian pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan pengalaman kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan potensi mereka dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi kehidupan. Pendidikan tidak hanya terbatas pada proses formal di sekolah atau lembaga pendidikan, tetapi juga melibatkan pengalaman dan pemikiran yang lebih luas tentang pembelajaran dan perkembangan manusia.

Secara garis besar tujuan pendidikan nasional juga menegaskan pendidikan dikhususkan untuk menciptakan generasi yang berintegritas, berakhlak mulia, dan berkualitas, yang memiliki kecerdasan intelektual dan emosional yang baik, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi, memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai Pancasila dan budaya nasional, serta mampu berkontribusi positif dalam pembangunan masyarakat dan negara sesuai dengan tuntutan global. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menekankan pendidikan “bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” dalam posisi ini, Yusuf & Aziizu, (2015) memberikan penjelasan dalam konteks tertentu, pendidikan nasional dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan yang dimaksud disini bukan semata-mata kecerdasan yang hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual saja, melainkan kecerdasan menyeluruh yang mengandung makna lebih luas.

Tuntutan untuk mencerdaskan seluruh aspek peserta didik, sebagaimana tercermin dalam landasan Undang-Undang 1945, membawa kompleksitas tersendiri dalam konteks realitas pendidikan masa kini. Meskipun menjadi tujuan yang terpuji untuk memberikan pendidikan yang merangkul aspek-aspek holistik dalam perkembangan individu, namun pelaksanaannya menghadirkan sejumlah tantangan yang memerlukan pemikiran mendalam. Di tengah era dinamika yang dipicu oleh perkembangan teknologi dan perubahan mendalam, pendidikan harus mengikuti pola evolusi agar tetap relevan dan dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan tuntutan zaman. Selain itu, dalam menghadapi era globalisasi dan keberagaman budaya,

pendidikan harus berusaha mencerdaskan tak hanya dalam dimensi akademis, tetapi juga dalam memupuk sikap inklusif, toleransi, dan kemampuan beradaptasi dengan perbedaan. Namun, tantangan ini semakin rumit dalam konteks pendidikan nasional yang heterogen dalam kualitas dan aksesibilitasnya di berbagai wilayah. Harapan untuk mencerdaskan seluruh aspek pada peserta didik mengingatkan kita pada urgensi untuk mengatasi disparitas pendidikan, memastikan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk mengembangkan potensinya tanpa terhalang oleh faktor-faktor seperti latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Sebagai implikasinya, seringkali pendidikan juga gagal dalam membentuk kepribadian maupun kecerdasan moral peserta didik di era saat ini.

Klaim tersebut bukanlah tanpa alasan. Melainkan, didasarkan pada fakta atas menurunnya moral peserta didik akibat gesekan tajam dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan serba canggih pada masa kini. Temuan penelitian yang dilakukan oleh Aulia et, al, (2022) menunjukkan bahwa 82,29% Globalisasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap moralitas peserta didik. Selanjutnya, Hermawan, (2019) Munculnya perubahan moral pada remaja di Indonesia tidak lepas dari pengaruh budaya luar yang telah masuk ke dalam budaya dan lingkungan Indonesia. Artinya, Globalisasi dan konektivitas yang semakin kuat telah membawa masuk nilai-nilai, norma sosial, dan gaya hidup baru yang sebelumnya tidak begitu dominan di dalam masyarakat Indonesia. Menyikapi hal itu, Tilaar, (1999) juga berpendapat bahwa fenomena merosotnya moral pada peserta didik tersebut merupakan salah satu akses dari kondisi masyarakat yang sedang berada dalam fase transformasi sosial menghadapi era globalisasi. (dalam, Nurohmah & Dewi, 2021). Demikian dapat dipahami bahwa pada posisi ini kita menemukan suatu titik krusial yang patut menjadi perhatian serius, yaitu menurunnya moralitas di kalangan peserta didik turut serta dipengaruhi oleh arus globalisasi.

Dalam pengertiannya, Moral adalah seperangkat nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma-norma yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat. Konsep moral berkaitan dengan pertimbangan tentang apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk, serta adil atau tidak adil dalam interaksi dan tindakan manusia. disisi lain, Nurohmah & Dewi, (2021) menyatakan moral mengacu pada seperangkat nilai-nilai, prinsip-prinsip, norma-norma, atau standar-standar etika yang mengatur perilaku dan tindakan individu dalam masyarakat. Ini melibatkan pemahaman tentang apa yang dianggap benar dan salah, baik dan buruk, serta bagaimana seseorang seharusnya bertindak atau berperilaku dalam berbagai situasi. Moral berfungsi sebagai panduan untuk membantu individu membuat keputusan yang etis dan bertanggung jawab, serta mempengaruhi interaksi mereka dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Dalam perkembangannya, Nilai-nilai moral dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, agama, pendidikan, dan pengalaman personal, dan mereka membentuk dasar untuk membuat keputusan etis dan menjalani kehidupan dalam cara yang dianggap pantas dan bermartabat.

Urgensi akan pentingnya moral pada peserta didik, memiliki orientasi yang tidak lain untuk menghasilkan generasi muda yang unggul bukan hanya pada sisi akademiknya. Namun juga, unggul dari sisi kecerdasan moralnya. Merujuk pada tujuan pendidikan nasional dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 2 menyebutkan mengenai arti dari pendidikan nasional yang berbunyi, "Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman." Kemudian Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional terdapat dalam pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 yang berbunyi "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Secara tersirat, undang-undang tersebut menitikberatkan pada nilai-nilai Religius, Jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Olehnya, guna mencapai tujuan pendidikan

nasional, perlu adanya peran guru dalam membentuk kecerdasan moral siswa baik di tingkat Tk, Sd, SMP, SMA hingga pada tingkat perguruan tinggi. alasanya, guru merupakan salah satu subjek yang dapat menentukan baik buruknya perilaku peserta didik. Meskipun, Dalam pengimplementasinya, sebenarnya guru telah melakukan apa yang sudah menjadi kewajibanya. Namun ironisnya, para guru ini sering kali mendapatkan tanggapan yang menyalahkan mereka sebagai akar permasalahan ini. Fenomena ini membawa kita pada pandangan baru yang kontroversial, yaitu bahwa dalam situasi saat ini, para guru mungkin gagal dalam tugas mereka untuk membentuk kepribadian peserta didik. Munculnya perdebatan mengenai peran guru dalam pembentukan karakter peserta didik bukanlah hal yang sepele. Banyak kalangan berpendapat bahwa beban moralitas yang semestinya diterapkan dalam keluarga dan lingkungan sekitar, sekarang justru dialihkan secara utuh kepada guru. Ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai batasan tanggung jawab antara keluarga dan sekolah dalam membentuk karakter individu.

Secara definisi, Guru adalah seorang pendidik atau pengajar yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam suatu bidang tertentu, serta bertugas untuk mengajar, membimbing, dan mendidik siswa atau muridnya. Peran guru sangat penting dalam proses pendidikan, karena mereka memiliki tanggung jawab untuk mentransfer pengetahuan dan nilai-nilai kepada generasi muda. Tidak hanya sebagai penyampai informasi, guru juga berperan dalam membentuk karakter, sikap, dan perilaku siswa. Guru harus memiliki kemampuan dalam merancang dan menyampaikan materi pelajaran dengan cara yang efektif agar siswa dapat memahami dan menguasai materi dengan baik. Selain itu, guru juga bisa berperan sebagai teladan dan inspirasi bagi siswa dalam berbagai aspek kehidupan. Peran guru mencakup berbagai tugas dan fungsi penting dalam konteks pendidikan, termasuk sebagai pengajar yang memberikan materi pelajaran secara efektif, pembimbing dalam merancang tujuan serta memberikan dukungan pribadi, penilai kemajuan siswa, motivator dalam mendorong keterlibatan dan prestasi, fasilitator pembelajaran yang kreatif, manajer kelas yang menciptakan lingkungan belajar yang tertib, teladan dalam perilaku dan nilai-nilai, serta kolaborator dengan berbagai pihak untuk meningkatkan proses belajar sesuai perkembangan zaman.

Menyikapi problematika diatas, temuan permasalahan menyangkut peran guru khususnya guru PPKn di SMP Negeri 1 Banggai Tengah masih menunjukkan adanya keterbatasan dalam melakukan peranya. Sebagai implikasinya, siswa tampak kurang terampil dalam memahami dan mengembangkan nilai-nilai moral yang esensial. Selain, itu temuan permasalahan juga menunjukkan bahwa belum maksimalnya peran guru dalam mengembangkan kecerdasan moral peserta didik (siswa/siswi) di sekolah tersebut turut dipengaruhi oleh dua faktor; *pertama*, Secara internal, lemahnya kedisiplinan siswa yang menjadi salah satu faktor yang menghalangi proses pembelajaran. Ketidaksiplinan ini dapat mengganggu fokus belajar, mengurangi interaksi positif dalam kelas, dan merusak lingkungan belajar yang kondusif. Faktor ini dapat memengaruhi upaya guru untuk berperan sebagai fasilitator, mediator, atau evaluator yang efektif. *kedua*, faktor eksternal juga memberikan kontribusi terhadap masalah ini. Kurangnya dorongan dari orang tua untuk memotivasi anak-anak mereka dalam belajar dapat berdampak negatif pada efektivitas peran guru. Jika orang tua tidak mendukung motivasi belajar siswa, siswa akan kurang termotivasi untuk aktif dalam proses belajar, termasuk dalam hal pengembangan aspek afektif, kognitif, dan evaluatif. Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Guru PPKn Dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral Peserta Didik Di Smp Negeri 1 Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut.

METODE

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Dimana, metode ini menggambarkan, menjelaskan, dan memahami fenomena atau peristiwa dalam konteks alamiahnya. Tujuannya adalah untuk menggali pemahaman mendalam tentang suatu fenomena, mengidentifikasi pola-pola, relasi, dan makna yang ada di dalamnya. Metode ini lebih berfokus pada interpretasi dan pemahaman konteks sosial serta menggali makna yang terkandung dalam data yang dikumpulkan. (Salim, 2019). Dalam pelaksanaannya, metode penelitian deskriptif kualitatif melibatkan analisis data yang mengandalkan teknik seperti

kategorisasi, tema, dan analisis naratif. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih kaya dan kompleks tentang suatu fenomena, serta memberikan dasar bagi penelitian lanjutan atau pengambilan keputusan dalam berbagai bidang. (Sutisna, 2021). Adapun Lokasi penelitian berlangsung di SMP Negeri 1 Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, yang merupakan lingkungan nyata tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan. Dalam hal metode pengumpulan data, penelitian ini akan memanfaatkan beberapa teknik yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan yang dilibatkan yaitu, satu (1) orang Guru mata pelajaran PPKn, empat (4) orang Peserta didik, dan satu (1) orang Kepala Sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Guru PPKn Dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral Peserta Didik di SMP Negeri 1 Banggai Tengah

Peran Guru PPKn Sebagai Demonstrator

Peran Guru sebagai Demonstrator dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral Peserta Didik Sebagai demonstrator, guru berfungsi sebagai contoh nyata dalam perilaku dan tindakan moral. Guru menjadi model teladan bagi peserta didik dalam hal sikap, nilai-nilai, dan etika yang diinginkan. Guru menunjukkan prinsip-prinsip moral dalam tindakan sehari-hari, membantu peserta didik untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut melalui observasi dan interaksi langsung. Berknaan dengan hal itu, Faulina Sundari, (2017) menegaskan bahwa Guru Berperan sebagai Demonstrator artinya guru memiliki tanggung jawab untuk memperlihatkan kepada siswa berbagai hal yang dapat membantu mereka untuk lebih memahami pesan yang disampaikan. (a) Dalam perannya ini, guru perlu menunjukkan perilaku yang terpuji. Sebagai demonstrator, guru berfungsi sebagai contoh dan panutan bagi siswa. (b) Selain itu, guru juga diharapkan mampu merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif.

Disisi lain Meri & Mustika, (2022) juga menyatakan Peran guru sebagai demonstrator dapat diartikan sebagai sosok yang tidak hanya memberikan penjelasan verbal, tetapi juga menunjukkan tindakan konkret kepada siswa. Dalam peran ini, guru bukan hanya sekadar mengajar, tetapi juga berfungsi sebagai panutan dalam hal sikap dan perilaku terpuji. Guru yang menjalankan peran sebagai demonstrator akan menghadirkan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari kepada siswa. Sikap-sikap terpuji seperti integritas, etika, kerja keras, dan empati ditampilkan dalam interaksi guru dengan siswa. Guru memberikan bukti konkret bahwa nilai-nilai positif ini tidak hanya teori belaka, melainkan sesuatu yang bisa diterapkan dalam praktik.

Atas hal tersebut, kaitanya dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Temuan penelitian mengenai peran demonstrator yang telah dilakukan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menunjukkan bahwa para guru tersebut telah secara maksimal berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang menghidupkan nilai-nilai Pancasila dan semangat kewarganegaraan dalam kelas. Guru PPKn dengan peran demonstrator telah berhasil menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif dan inspiratif, di mana mereka secara kreatif mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai konteks kehidupan nyata, baik dalam masyarakat maupun dunia global. Guru-guru ini secara aktif memanfaatkan beragam sumber daya seperti media pembelajaran interaktif, simulasi, diskusi kelompok, serta kunjungan lapangan untuk memberikan pengalaman belajar yang mendalam kepada siswa.

Melalui metode pembelajaran berbasis peran, simulasi, dan diskusi, guru-guru PPKn juga telah berhasil mengembangkan pemahaman kritis dan analitis siswa terhadap isu-isu sosial, politik, dan kewarganegaraan, sehingga siswa mampu mengaitkan konsep PPKn dengan realitas kehidupan mereka. Dengan demikian, peran demonstrator yang telah dilakukan oleh guru mata pelajaran PPKn tidak hanya menghasilkan pemahaman konseptual yang baik, tetapi juga memupuk sikap dan nilai-nilai kewarganegaraan yang positif, menjadikan siswa yang peduli, berperan aktif dalam masyarakat, serta memiliki identitas nasional yang kuat. Adapun Indikator-indikator yang dijadikan sebagai parameter keberhasilan peran demonstrator guru Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam mengembangkan kecerdasan moral peserta didik, berdasarkan uraian yang diberikan, antara lain:

1. **Fasilitasi Pembelajaran Interaktif dan Inspiratif:**
Guru-guru PPKn berhasil menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif dan inspiratif, di mana siswa aktif terlibat dalam diskusi, simulasi, dan peran yang mendorong pemahaman lebih dalam terhadap nilai-nilai Pancasila dan semangat kewarganegaraan. Keberhasilan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik dan bermakna adalah salah satu indikator keberhasilan peran demonstrator.
2. **Integrasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Konteks Kehidupan Nyata:**
Guru PPKn secara kreatif mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai konteks kehidupan nyata, baik dalam lingkup masyarakat maupun dalam skala global. Kemampuan guru untuk membawa nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari siswa merupakan indikator penting bahwa peran demonstrator berjalan dengan baik.
3. **Penggunaan Berbagai Sumber Daya Pembelajaran:**
Guru-guru secara aktif memanfaatkan beragam sumber daya, seperti media pembelajaran interaktif, simulasi, diskusi kelompok, dan kunjungan lapangan, untuk memberikan pengalaman belajar yang mendalam kepada siswa. Penggunaan sumber daya yang variatif menunjukkan kemampuan guru dalam menciptakan pengalaman belajar yang memperkaya pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila.
4. **Pengembangan Pemahaman Kritis dan Analitis Siswa:**
Melalui metode pembelajaran berbasis peran, simulasi, dan diskusi, guru-guru PPKn berhasil mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan analitis terhadap isu-isu sosial, politik, dan kewarganegaraan. Kemampuan siswa dalam mengaitkan konsep PPKn dengan realitas kehidupan mereka merupakan indikator bahwa peran demonstrator telah berhasil membangun pemahaman yang lebih dalam dan kontekstual.
5. **Pemupukan Sikap dan Nilai-Nilai Kewarganegaraan:** Selain pemahaman konseptual, peran demonstrator juga berhasil memupuk sikap dan nilai-nilai kewarganegaraan yang positif pada siswa. Hal ini tercermin dalam rasa peduli, partisipasi aktif dalam masyarakat, serta identitas nasional yang kuat yang dibangun oleh siswa.

Dengan merujuk pada indikator-indikator di atas, hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa peran demonstrator guru PPKn di SMP Negeri 1 Banggai Tengah telah berhasil dalam mengembangkan kecerdasan moral dan kewarganegaraan siswa melalui pendekatan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, dan kontekstual.

Peran Guru PPKn Sebagai Mediator Dan Fasilitator

Peran guru sebagai mediator dan fasilitator berfungsi untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep moral, merangsang diskusi, dan memfasilitasi refleksi mengenai masalah-masalah moral. Guru menciptakan lingkungan belajar yang terbuka untuk berbagai pandangan, berdebat, dan merangsang pemikiran kritis terkait dengan isu-isu moral. Guru juga membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir etis dan membuat keputusan moral yang tepat. Artinya, Guru PPKn berperan sebagai mediator dalam menghubungkan dan memediasi pemahaman antara siswa dengan berbagai nilai-nilai Pancasila, konstitusi negara, dan prinsip-prinsip demokrasi. Guru PPKn membantu siswa untuk memahami perspektif beragam dan mengatasi perbedaan pendapat dengan cara yang konstruktif. Guru PPKn juga dapat menjadi jembatan dalam menangani konflik atau perbedaan pandangan yang mungkin muncul di kelas terkait isu-isu kebangsaan dan kewarganegaraan. Sedangkan, Guru PPKn berperan sebagai fasilitator adalah tindakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan partisipatif. (Rahayu et al., 2022).

Secara lebih khusus, dalam konteks peran individu, seperti yang dijelaskan oleh Cohen (1992:25), dapat dikelompokkan menjadi tujuh bagian yang meliputi:

1. **Anacted Role**, yakni ketika seseorang secara nyata melaksanakan perannya melalui tindakan konkret;

2. Prescribed Role, yang mengacu pada cara yang diharapkan oleh lingkungan dalam menjalankan peran tertentu;
3. Role Conflict, terjadi ketika seseorang menghadapi konflik peran karena menduduki status atau peran yang saling bertentangan dalam tujuan dan harapannya;
4. Role Distance, merujuk pada pelaksanaan peran dengan keterlibatan emosional yang stabil, contohnya adalah ketika seorang guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjalankan tugas mengajar di kelas;
5. Role Failure, yaitu ketika seseorang tidak berhasil menjalankan peran yang ditetapkan;
6. Role Model, mencerminkan situasi di mana perilaku seseorang menjadi contoh yang dicontohi dan diikuti oleh individu lain;
7. Role Set, yang menggambarkan interaksi individu dengan orang lain saat mereka menjalankan peran masing-masing. Pada intinya, komponen-komponen ini membentuk dimensi yang kompleks dari peran individu dalam masyarakat, yang mencakup interaksi, harapan, konflik, aspek emosional, contoh, serta hubungan antar individu.

Berkenaan dengan hal itu, Temuan penelitian menunjukkan Peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai mediator dan fasilitator dalam mengembangkan kecerdasan moral peserta didik di SMP Negeri 1 Banggai Tengah menunjukkan bahwa guru-guru PPKn di sekolah ini telah memainkan peran kunci dalam membantu siswa memahami, menghayati, dan menginternalisasi nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila dan ajaran kewarganegaraan. Guru PPKn di SMP Negeri 1 Banggai Tengah telah berhasil menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi siswa untuk merenung, berdialog, dan mengambil sikap terhadap situasi moral yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang interaktif, seperti diskusi etika, studi kasus, serta simulasi dilema moral, guru-guru tersebut membantu siswa mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang konflik moral dan memfasilitasi diskusi yang mendorong pemikiran kritis.

Melalui kegiatan-kegiatan seperti perdebatan etika, analisis berita, dan proyek sosial, guru-guru PPKn juga telah berhasil memadukan pembelajaran dengan pengalaman nyata, sehingga siswa dapat merasakan dan mempraktikkan nilai-nilai moral dalam konteks nyata. Dalam perannya sebagai mediator, guru-guru ini berperan dalam memfasilitasi diskusi dan refleksi siswa tentang isu-isu moral yang kompleks, serta membantu mereka dalam merumuskan solusi atau sikap yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, peran guru PPKn sebagai mediator dan fasilitator dalam mengembangkan kecerdasan moral peserta didik di SMP Negeri 1 Banggai Tengah tidak hanya membantu siswa memahami teori moral, tetapi juga mendorong mereka untuk menginternalisasi dan mengaplikasikan nilai-nilai moral dalam tindakan sehari-hari, membentuk generasi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab.

Adapun indikator keberhasilan peran mereka; (1) Pertama, melalui penciptaan lingkungan belajar yang interaktif, guru-guru PPKn mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi, debat, dan refleksi mengenai isu moral. Hal ini membuktikan keberhasilan mereka dalam merangsang keterlibatan siswa; (2) Penerapan beragam strategi pembelajaran menarik, seperti analisis berita, diskusi etika, dan proyek sosial, membantu mengasah kemampuan berpikir kritis siswa serta memperdalam pemahaman mereka tentang isu-isu moral; (3) Guru-guru PPKn efektif dalam mengembangkan kecerdasan moral siswa dengan membantu mereka memahami dan menginternalisasi nilai-nilai moral dalam Pancasila dan ajaran kewarganegaraan. Siswa mampu merenung, berdialog, dan mengambil tindakan terkait situasi moral, menggambarkan keberhasilan guru dalam mentransfer nilai-nilai ini; (4) Melalui fasilitasi diskusi dan refleksi mengenai isu-isu moral yang kompleks, guru-guru PPKn berhasil membantu siswa merumuskan solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan etika; (5) siswa mampu menerapkan nilai-nilai moral yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari di luar kelas, menunjukkan dampak positif dari fasilitasi guru dalam mendorong penerapan nilai-nilai ini dalam praktek nyata; (6) integrasi pengalaman praktis seperti debat etika, analisis berita, dan proyek sosial memungkinkan siswa untuk merasakan dan menerapkan nilai-nilai moral dalam situasi kehidupan yang nyata.

Dengan demikian, Guru-guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMP Negeri 1 Banggai Tengah memiliki peran penting dalam mengembangkan kecerdasan moral siswa melalui kegiatan-kegiatan seperti perdebatan etika, analisis berita, dan proyek sosial. Mereka bertindak sebagai mediator dan fasilitator dalam memfasilitasi diskusi, refleksi, dan pengaplikasian nilai-nilai moral dalam konteks nyata. Berbagai indikator keberhasilan dari peran mereka termasuk penciptaan lingkungan belajar interaktif, penerapan strategi pembelajaran menarik, pengembangan pemahaman nilai-nilai moral, merumuskan solusi berdasarkan Pancasila, penerapan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari, dan integrasi pengalaman praktis dalam pembelajaran. Melalui peran guru-guru PPKn ini, siswa tidak hanya memahami teori moral, tetapi juga mampu menginternalisasi dan mengaplikasikan nilai-nilai moral dalam tindakan sehari-hari, dengan tujuan membentuk generasi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab.

Peran Guru PPKn Sebagai Evaluator

Sebagai evaluator, guru bertanggung jawab untuk menilai perkembangan moral peserta didik. Guru menggunakan berbagai metode penilaian, seperti observasi, penugasan, diskusi kelompok, dan ujian, untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai moral dan kemampuan mereka dalam menghadapi situasi-situasi moral. Penilaian ini membantu guru dan peserta didik untuk melihat progres perkembangan kecerdasan moral dan mengidentifikasi area yang perlu lebih diperhatikan. Peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai evaluator dalam mengembangkan kecerdasan moral peserta didik di SMP Negeri 1 Banggai Tengah sangat penting dalam memastikan perkembangan nilai-nilai moral dan karakter siswa. Kusuma (2020), yang menyatakan bahwa: "Fungsi evaluator guru adalah untuk mengumpulkan data tentang prestasi belajar siswa, menganalisisnya, dan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk mengambil tindakan yang tepat guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, termasuk pemahaman siswa terhadap materi pelajaran, kemampuan kritis, dan penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penilaian yang cermat, guru dapat mengidentifikasi area di mana siswa memerlukan dukungan tambahan dan mengembangkan strategi yang sesuai untuk mendukung perkembangan mereka". (dalam, Novianti et al., 2020).

Dalam realisasinya peran guru PPKn sebagai evaluator di SMP Negeri 1 Banggai Tengah Menunjukkan guru PPKn ini telah berperan aktif dalam memantau, menilai, dan memberikan umpan balik terhadap perkembangan moral siswa. Guru-guru PPKn telah melakukan evaluasi secara kontinyu terhadap pemahaman siswa tentang nilai-nilai moral yang diajarkan dalam pembelajaran. Melalui penugasan, ujian, diskusi reflektif, dan proyek evaluatif, mereka mampu mengukur sejauh mana siswa telah menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan bagaimana siswa mengaplikasikannya dalam situasi-situasi kehidupan nyata. Selain itu, guru-guru PPKn juga berperan dalam membantu siswa mengidentifikasi potensi perubahan perilaku yang lebih positif. Melalui diskusi terbimbing dan refleksi, mereka mendorong siswa untuk mengenali dan memahami aspek-aspek moral yang perlu diperbaiki serta memberikan dukungan untuk mencapai perubahan tersebut. Peran sebagai evaluator ini juga mendorong guru PPKn untuk mengembangkan berbagai metode dan instrumen penilaian yang relevan dengan tujuan pengembangan kecerdasan moral. Guru-guru ini terlibat dalam proses merancang tes etika, proyek berbasis nilai, serta menggunakan rubrik penilaian yang memberikan gambaran komprehensif tentang perkembangan moral siswa.

Indikator keberhasilan yang mencerminkan peran guru PPKn dalam memantau dan mengevaluasi perkembangan moral siswa di SMP Negeri 1 Banggai Tengah adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Kontinyu: Guru-guru PPKn secara berkelanjutan melakukan evaluasi terhadap pemahaman siswa mengenai nilai-nilai moral yang diajarkan dalam pembelajaran. Evaluasi ini melibatkan berbagai bentuk seperti penugasan, ujian, diskusi reflektif, dan proyek evaluatif.
2. Mengukur Internalisasi Nilai: Guru-guru mampu mengukur sejauh mana siswa telah menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan mampu mengaplikasikannya dalam situasi

kehidupan nyata melalui hasil dari penugasan, ujian, diskusi, dan proyek yang dilakukan siswa.

3. Mendorong Perubahan Positif: Guru PPKn membantu siswa mengidentifikasi potensi perubahan perilaku yang lebih positif. Melalui diskusi terbimbing dan refleksi, mereka mendorong siswa untuk mengenali aspek-aspek moral yang perlu diperbaiki dan memberikan dukungan untuk mencapai perubahan tersebut.
4. Pengembangan Metode Penilaian: Guru-guru PPKn terlibat aktif dalam merancang beragam metode dan instrumen penilaian yang relevan dengan pengembangan kecerdasan moral. Ini termasuk merancang tes etika, proyek berbasis nilai, dan menggunakan rubrik penilaian yang memberikan gambaran komprehensif tentang perkembangan moral siswa.
5. Refleksi dan Umpan Balik: Guru-guru memberikan umpan balik kepada siswa berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi yang dilakukan. Ini mencakup diskusi mengenai perkembangan moral siswa, pengakuan atas perbaikan, dan bimbingan untuk terus berkembang dalam aspek moral.
6. Penggunaan Instrumen Evaluasi Beragam: Guru-guru PPKn menggunakan berbagai instrumen evaluasi seperti diskusi reflektif, penugasan, ujian, dan proyek evaluatif. Ini menunjukkan pendekatan yang holistik dalam mengukur perkembangan moral siswa.
7. Integrasi Nilai-nilai dalam Pembelajaran: Guru PPKn memastikan bahwa nilai-nilai moral terintegrasi dalam proses pembelajaran sehari-hari, menciptakan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam berbagai konteks.
8. Peningkatan Kesadaran Moral: Guru-guru PPKn berhasil meningkatkan kesadaran moral siswa melalui interaksi yang terbimbing, refleksi, dan dialog tentang isu-isu moral yang kompleks, membantu siswa dalam mengembangkan pandangan yang lebih beragam dan mendalam.
9. Melalui indikator-indikator ini, peran guru PPKn dalam membina perkembangan moral siswa menjadi jelas dan dapat diukur secara konkret dalam konteks pembelajaran.

Dengan demikian, peran guru PPKn sebagai evaluator dalam mengembangkan kecerdasan moral peserta didik di SMP Negeri 1 Banggai Tengah bukan hanya mengukur pemahaman siswa terhadap nilai-nilai moral, tetapi juga mendukung proses refleksi, perubahan perilaku positif, dan memastikan bahwa pendidikan karakter yang diterapkan benar-benar berdampak dalam membentuk generasi yang bermoral tinggi dan bertanggung jawab.

Faktor Faktor Penghambat Guru PPKn Dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral Peserta Didik di SMP Negeri 1 Banggai Tengah.

Kedisiplinan Peserta Didik.

Kedisiplinan siswa merujuk pada kemampuan siswa untuk mengikuti aturan, norma, dan tata tertib yang berlaku di lingkungan sekolah atau institusi pendidikan. Ini mencakup tingkah laku dan sikap siswa dalam menghormati waktu, menjaga ketertiban, berpartisipasi aktif dalam proses belajar, serta menghindari perilaku yang mengganggu atau melanggar norma. Kedisiplinan siswa melibatkan komitmen untuk menghormati otoritas guru, mengikuti peraturan sekolah, serta mengembangkan tanggung jawab pribadi terhadap tindakan dan keputusan mereka dalam lingkungan pendidikan. Kedisiplinan siswa memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif, memupuk nilai-nilai positif, dan mempersiapkan siswa untuk menjadi individu yang tanggap terhadap tata tertib masyarakat dan lingkungan. Verasiana et al., (2022) Kedisiplinan adalah suatu keadaan atau situasi yang terjadi ketika seseorang secara konsisten melakukan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai seperti patuh, taat, setia, tertib, dan keteraturan. Artinya, ketika seseorang memiliki kedisiplinan, mereka cenderung melakukan hal-hal yang sesuai dengan peraturan atau norma yang berlaku.

Dalam penerapannya, disiplin melibatkan kesadaran individu dalam mengendalikan diri sesuai dengan berbagai bentuk aturan (Ekosiswoyo, 2000). Definisi ini menggambarkan tiga aspek penting dari etika disiplin, yaitu kesadaran, pengendalian diri, dan aturan. Ekosiswoyo

menekankan arti disiplin sebagai kemampuan untuk mengatur diri sendiri, yang ditekankan harus dibangun melalui kesadaran diri terlebih dahulu dan kemudian berusaha mengikuti aturan. Wiwik (2005) menambahkan bahwa disiplin juga mencakup pengaruh yang membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan, serta bagaimana siswa merespons tuntutan tersebut dengan cara yang tepat. Keseluruhan, disiplin melibatkan kemampuan mengendalikan diri, kesadaran terhadap aturan, dan adaptasi terhadap lingkungan, yang secara bersama-sama berkontribusi pada perkembangan etika disiplin individu. (dalam, Chandra & Angin, 2017).

Oleh karena itu, parameter kedisiplinan tercermin dari kesediaan individu untuk mematuhi aturan dan panduan secara konsisten. Ini memiliki peran penting dalam membantu individu memahami tanggung jawab yang harus dijalankan dan perilaku yang sebaiknya dihindari. Sebagai contoh, dalam lingkup pendidikan, siswa yang menjunjung tinggi disiplin akan hadir di sekolah sesuai jadwal, mengikuti norma tata tertib di kelas, serta melaksanakan tugas-tugas secara teratur. Melalui pengembangan kedisiplinan, individu dapat membentuk pola pikir yang jelas mengenai harapan yang diberikan dan cara menjalankan aktivitas rutin dengan teratur. Kedisiplinan berperan dalam mengendalikan perilaku individu, menghindari tindakan yang tidak diinginkan, dan mencapai target secara lebih optimal. Secara substansial, kedisiplinan mencerminkan kemampuan seseorang untuk menginternalisasi nilai-nilai tertentu dalam tindakan sehari-hari, memungkinkan mereka mengelola diri dengan efisien serta meraih hasil yang diinginkan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kedisiplinan siswa menjadi salah satu faktor penghambat dalam peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam mengembangkan kecerdasan moral mereka di SMP Negeri 1 Banggai Tengah. Analisis data mengindikasikan bahwa tingkat kedisiplinan siswa dalam proses pembelajaran sangat kurang, terutama dalam hal kehadiran yang tidak teratur, ketidakpatuhan terhadap aturan, serta kurangnya tanggung jawab dalam menerapkan nilai-nilai moral dalam tindakan sehari-hari. Kondisi ini menyebabkan upaya guru PPKn untuk memfasilitasi diskusi dan refleksi terbuka mengenai isu-isu moral menjadi kurang efektif, mengingat keterlibatan dan partisipasi siswa yang rendah. Ketidaksiplinan siswa juga dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan program pendidikan karakter yang diterapkan oleh guru PPKn. Oleh karena itu, penanganan masalah kedisiplinan siswa perlu menjadi perhatian bersama antara guru, pihak sekolah, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pengembangan kecerdasan moral yang lebih baik.

Hubungan Kerja Sama Antara Sekolah Dan Orang Tua

Hubungan antara orang tua dan sekolah merujuk pada kendala atau tantangan yang dapat menghambat kerja sama yang efektif antara kedua pihak tersebut dalam mendukung pendidikan dan perkembangan siswa. Hubungan yang kurang harmonis atau terganggu antara orang tua dan sekolah dapat mempengaruhi pengalaman belajar siswa serta keberhasilan pendidikan mereka. Chandra & Angin, (2017) menyajikan bahwa hubungan ini melibatkan kapasitas orang tua untuk memberikan perhatian yang memadai serta mendukung proses belajar anak di lingkungan sekolah. Sementara itu, peran sekolah adalah untuk mengkomunikasikan setiap kendala yang mungkin timbul dalam proses belajar kepada anak. Dengan kata lain, kolaborasi yang terbangun dalam hubungan ini memberikan dampak signifikan pada peran guru dalam upaya mendidik dan membimbing siswa.

Sehingga, hubungan antara orang tua dan sekolah memiliki peran krusial dalam mendukung pendidikan dan perkembangan siswa. Meskipun dapat terjadi kendala atau tantangan yang menghambat kerja sama yang efektif antara keduanya, kolaborasi yang baik dapat memiliki dampak positif pada pengalaman belajar siswa dan kesuksesan pendidikan mereka. Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan perhatian dan dukungan kepada anak-anaknya dalam proses belajar di sekolah. Sebaliknya, sekolah bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan baik kepada orang tua mengenai tantangan yang mungkin dihadapi siswa. Dengan membangun hubungan yang kuat, peran guru menjadi lebih efektif dalam memberikan pendidikan yang holistik kepada siswa.

Dalam konteks SMP Negeri 1 Banggai Tengah, hasil penelitian menunjukkan adanya hambatan dalam hubungan kerja sama antara sekolah dan orang tua, terutama terkait dengan

kurangnya maksimalnya hubungan komunikasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa terdapat kendala dalam aliran informasi dan interaksi antara dua pihak yang sangat penting dalam mendukung pengembangan kecerdasan moral peserta didik. Hubungan yang kurang optimal antara sekolah dan orang tua dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan moral siswa. Ketidakselarasan dalam pandangan dan nilai-nilai yang ditanamkan di rumah dan di sekolah dapat mengurangi pemahaman dan penerapan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari siswa. Kurangnya komunikasi dan kolaborasi antara dua entitas ini juga dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dalam pendekatan dan strategi yang diterapkan dalam mendukung perkembangan karakter siswa.

Selain itu, temuan juga menunjukkan perlunya perbaikan dalam bidang komunikasi antara sekolah dan orang tua. Dibutuhkan upaya yang lebih intensif dalam menyampaikan informasi tentang program-program pendidikan karakter yang dilakukan di sekolah kepada orang tua. Sebaliknya, sekolah juga perlu mendengarkan masukan dan pandangan dari orang tua untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi program-program tersebut. Peningkatan kerja sama ini juga dapat melibatkan kegiatan-kegiatan seperti pertemuan orang tua dan guru, seminar atau lokakarya terkait pendidikan karakter, serta penggunaan platform komunikasi yang memudahkan berbagi informasi secara reguler. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa hubungan yang lebih erat antara sekolah dan orang tua akan memberikan dukungan yang lebih kuat dalam mengembangkan kecerdasan moral peserta didik di SMP Negeri 1 Banggai Tengah, menghasilkan individu yang bermoral tinggi dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada Pihak Sekolah SMP Negeri 1 Banggai Laut atas dukungan dan kerjasama yang luar biasa. Izin, fasilitas, dan dukungan yang telah diberikan telah membantu peneliti melaksanakan penelitian dengan lancar dan sukses. Peneliti, juga ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) atas bimbingan dan ilmu berharga yang telah peneliti terima. Dukungan akademik dari dosen-dosen yang berpengalaman dalam bidang ini telah memberikan sumbangan penting dalam pengembangan penelitian ini.

SIMPULAN

Kesimpulannya, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMP Negeri 1 Banggai Laut telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, yaitu sebagai Demonstrator, Mediator, dan Fasilitator, serta Evaluator. Mereka telah berhasil berperan dalam membimbing, memfasilitasi, dan menilai perkembangan kecerdasan moral siswa secara efektif. Namun, terdapat dua faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan peran guru PPKn di sekolah tersebut. Pertama, kedisiplinan siswa terlihat belum mencapai tingkat maksimal. Kedisiplinan siswa yang kurang optimal dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran PPKn dan implementasi nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, hubungan terbatas antara orang tua dan sekolah dalam hal komunikasi juga dapat menjadi hambatan. Kolaborasi yang terbatas ini mungkin mempengaruhi pemahaman orang tua mengenai perkembangan moral anak serta membatasi dukungan mereka dalam mendukung pendidikan PPKn. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dan memperkuat hubungan antara orang tua dan sekolah. Dengan mengatasi faktor penghambat ini, guru PPKn dapat lebih efektif dalam menjalankan peran mereka dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih positif bagi perkembangan moral siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, N., Nurdiana, N., & Hadi, S. (2022). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Sosial Siswa. *Journal of Education and Culture*, 2(1), 64–70. <https://doi.org/10.58707/jec.v2i1.176>
- Chandra, A., & Angin, A. (2017). Hubungan Perhatian Orang Tua Dan Iklim Sekolah Dengan

- Disiplin Pada Siswa Smp N 2 Padang Tualang Kabupaten Langkat. *Jurnal Phsycomutiara*, 1(1), 1–14. <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/Psikologi/article/view/129/147>
- Faulina Sundari. (2017). Peran Guru Sebagai Pembelajar dalam Memotivasi Peserta Didik Usia SD. *Prosiding Diskusi Panel Pendidikan, April*, 60–76.
- Hermawan, D. (2019). Dampak Globalisasi Terhadap Moralitas Remaja (Studi SMK Swasta Putra Bunda Tanjung Pura) Tahun Pelajaran 2018/2019. *Jurnal Serunai Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 88–93. <https://doi.org/10.37755/jspk.v8i1.136>
- Meri & Mustika. (2022). Peran Guru dalam Pembelajaran di Kelas V Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 200–208. <https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>
- Novianti, E., Firmansyah, Y., & Susanto, E. (2020). Peran guru PPKn sebagai evaluator dalam meningkatkan disiplin belajar siswa. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 112–116. <https://doi.org/10.36805/civics.v5i2.1337>
- Nurohmah, A. N., & Dewi, D. A. (2021). Penanaman Nilai Moral dan Karakter di Era Pandemi melalui Pendidikan dengan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila. *Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 119–128.
- Rahayu, N., Ndona, Y., & Setiawan, D. (2022). Peran Guru dalam Meningkatkan Keaktifan Siswa dengan Model Contextual Teaching and Learning (CTL) Muatan Pelajaran PKN Disekolah Dasar. *Jurnal Sintaktis: Pendidikan Guru Sekolah Dasar, IPA, IPS, Dan Bahasa Inggris*, 4(1), 89–96. <http://jurnal.stkipalmaksum.ac.id/>
- Salim, H. (2019). Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis. Kencana.
- Sutisna, A. (2021). Metode Penelitian Kualitatif Bidang Pendidikan. UNJ press.
- Verasiana, Kertih, I. W., & Yudana, I. M. (2022). *Peran Guru PPKn Dalam Upaya Meningkatkan salah satu sumber pembangunan Nasional di Indonesia karena , dengan adanya bersaing dan mencerminkan kepribadian bangsa .* 4(April), 49–57. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/index>
- Yusuf, B., & Aziizu, A. (2015). 46 tujuan besar pendidikan adalah tindakan. *Prosiding KS: Riset & PKM*, 2(2), 147–300.